

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Administrasi publik diartikan sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok atau lembaga pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik. Menurut Rosenbloom mengartikan bahwa administrasi publik adalah realisasi pemanfaatan teori, proses manajemen, politik dan hukum untuk dapat mengoptimalisasi peran pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan publik (Anggara, 2012). Oleh karena itu, pemerintah berperan penting bagi proses kehidupan masyarakat. Hal ini karena pemerintah memiliki tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah dunia menjadi mudah berkat dukungan teknologi komputer, terbukti bahwa mekanisme kerja yang panjang dan berulang menjadi efektif, komputer memegang peranan penting dalam menunjang kelancaran aktivasi pekerjaan di dalam suatu instansi, cara pengaturan data dengan menggunakan Sistem Basis Data (*Database System*) yang selama ini telah mendukung kinerja banyak instansi. Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi suatu instansi di dalam pengambilan keputusan, informasi dapat diperoleh dari sistem informasi (*Information System*).

*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda global yang terdiri dari 17 poin utama yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air

Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.



**Gambar 1.1** *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Sumber : Website Bappenas RI,2024

Dalam SDGs dinyatakan *no poverty* (tanpa kemiskinan) sebagai poin pertama prioritas. Hal ini berarti dunia sepakat untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun terkait dengan tujuan global yaitu dunia tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energy bersih dan terjangkau hingga kemitraan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. SDGs juga memiliki 4 pilar penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, dibutuhkan upaya dari seluruh pihak, baik

pemerintah, masyarakat, maupun perusahaan. 4 pilar tersebut meliputi : Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan dan Pilar Hukum dan Tata Kelola.

Berkaitan dengan upaya pemerintah dalam penanganan kemiskinan di Indonesia diantaranya Untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera dilakukan proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bagi masyarakat miskin sesuai dengan kriteria dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262 Tahun 2022 Tentang Kriteria Fakir Miskin (Kepmendikbudristek, 2022). Sementara itu dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2022 tentang Tata Cara Proses Usulan Data Serta Verifikasi dan Validasi Pasal 1 ayat 4 bahwa Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Kepmensos, 2022).

Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) merupakan sistem pengelolaan, pengumpulan, penyajian, penyimpanan data yang dikembangkan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial. Sistem ini dibangun mulai pertengahan tahun 2017, SIKS-NG diperkenalkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial dengan melakukan bimbingan teknis (Bimtek). Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) memuat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang bertujuan untuk melakukan verifikasi dan validasi data bagi penerima bantuan dengan menghadirkan data yang akurat khususnya untuk penanggulangan kemiskinan yang terjadi di

Indonesia. Aplikasi ini digunakan untuk menghasilkan data ringkasan atau *resume* seperti rekapitulasi dan data hasil perbaikan serta pengusulan data baru (Akbar et al, 2023).

Aplikasi SIKS-NG merupakan solusi pengelolaan data kemiskinan yang terpadu, efektif, dan efisien. Program aplikasi SIKS-NG ini berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan. SIKS-NG menerapkan sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Hal ini sejalan dengan Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang mengakhiri kemiskinan di mana pun dan dalam berbagai bentuk (Kominfo, 2019).

Di Kabupaten Bengkulu Selatan aplikasi SIKS-NG mulai di perkenalkan pada tahun 2019, sosialisasi dilakukan oleh setiap pendamping Kecamatan yang berasal dari Dinas Sosial. Dari setiap desa dipilih satu orang untuk menjadi operator yang bertanggung jawab terhadap aplikasi ini. Setelah data tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi SIKS-NG kemudian data tersebut diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan yang berwenang memverifikasi dan validasi data tersebut. Dengan menerapkan aplikasi SIKS-NG maka bantuan sosial diharapkan tepat sasaran dan berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Dibawah ini adalah data terpadu kesejahteraan sosial dalam SIKS-NG di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan:

Tabel 1.1

**Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Dalam SIKS-NG****Di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023-2024**

No	Kecamatan	Angka Kemiskinan
1.	Ulu Manna	7,025
2	Kota Manna	12,482
3	Manna	12,484
4	Pasar Manna	7,645
5	Pino Raya	15,568
6	Pino	9,554
7	Kedurang	8,989
8	Kedurang Ilir	6,283
9	Bunga Mas	5,405
10	Seginim	8,856
11	Air Nipis	13,104

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan (2024)

Data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui aplikasi SIKS-NG terdapat 107,395 individu yang tercatat dalam DTKS.

Masalah utama dalam pengolahan data kemiskinan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) di Kabupaten Bengkulu Selatan yang peneliti temukan yaitu masih adanya masyarakat yang menerima padahal sudah mampu, itu disebabkan masih kurangnya pemahaman petugas atau operator SIKS-NG dalam penginputan data DTKS, baik penambahan atau penggantian data,

sehingga data tersebut belum valid dan masih terdapat 1.972 data perlu perbaikan yang ditemukan di dalam aplikasi SIKS-NG dan sebanyak 115 yang termasuk data ganda. Wajar jika masih banyak data kemiskinan yang tidak valid, jika masyarakat yang sudah tidak layak menerima atau sudah mampu, tetap menerima bantuan (Efredy, 2023)

Pemecahan masalah ini memerlukan perhatian serius terhadap pemantauan dampak program, peningkatan sarana-prasarana, komprehensifitas dalam verifikasi data, optimalisasi koordinasi antarlembaga, dan pelatihan yang lebih baik bagi operator SIKS-NG. Kenyataan ini menjadi latar belakang yang sangat penting bagi peneliti yang merasa perlu untuk memahami dan mengevaluasi lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) dalam pendataan kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Walaupun sudah di terapkan aplikasi SIKS-NG untuk mengelola data kemiskinan sejak tahun 2019 namun masih ditemukan data tidak valid.
2. Belum optimalnya Aplikasi SIKS-NG dalam menghasilkan data kemiskinan yang terverifikasi dan tervalidasi.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) dalam pendataan kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan ?
2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) dalam pendataan kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Menganalisis efektivitas aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) dalam pendataan kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan.
- 2) Menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat efektivitas aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) dalam pendataan kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

- 1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai teori-teori administrasi publik yang berkaitan dengan efektivitas aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation*

(SIKS-NG) dalam pendataan kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan.

## 2) Manfaat Praktis

### a) Guna Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan wawasan yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan peneliti tentang efektivitas aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) dalam pendataan kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan. Di samping itu, peneliti ingin mengetahui/membandingkan tingkat kesesuaian teori dengan praktik yang terjadi di lapangan.

### b) Guna Bagi Lembaga

Semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi Instansi terkait yang menjadi objek penelitian sehingga diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini bisa memberikan masukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam efektivitas aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) dalam pendataan kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan.

### c) Guna Bagi Masyarakat

Semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi kehidupan masyarakat khususnya dalam aspek kesejahteraan sosial masyarakat.

## 1.6 Penelitian Terdahulu

**Akbar, Sakbir, Malipi, & Sahi (2023)** *Implementation of Social Welfare (DTKS) Integrated Data Program through the Next Generation Social Welfare Information System (SIKS-NG)*. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga indikator yang dinilai optimal, yaitu komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Sedangkan salah satu indikator lainnya yaitu indikator sumber daya dinilai belum maksimal terlihat dari penggunaan aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) yang sering mengalami gangguan atau kesalahan pada saat penginputan data dan ketidakstabilan sistem jaringan di wilayah pedesaan Huntu, khususnya di Kantor Desa Hunter.

**Karniawati & Andiani (2023)** *Poverty reduction in Inonesia through utilization of social security fund application*. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa SIKS-NG merupakan solusi pengelolaan data kemiskinan yang terpadu, efektif, dan efisien. Hal ini berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang mengakhiri kemiskinan di mana pun dan dalam berbagai bentuk. SIKS-NG menerapkan sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

**Oktavianto & Supriyanto (2023)** *Efektivitas Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation Guna Meningkatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Desa Sirnoboyo Kecamatan Benjeng-Gresik)*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa efektivitas aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* di Desa Sirnobojo sudah berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dalam aspek ketepatan sasaran program masyarakat miskin sudah benar dan berjalan dengan baik sampai sekarang. Pada aspek sosialisasi program SIKS-NG, bahwa sosialisasi sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kondisi lingkungan dan kemampuan pemerintahan desa yaitu dengan melakukan penyuluhan dibalai Desa, paguyuban PKK, serta kegiatan kemasyarakatan lainnya. Pada aspek tujuan program ini bahwa pemerintahan Desa Sirnobojo berhasil melaksanakan program keajahteraan tersebut dengan baik. Sehingga masyarakat yang layak benar-benar sesuai dengan sasaran program. Selanjutnya untuk pemantauan, pemerintahan Desa Sirnobojo bersinergi dengan BPD, Kepala Dusun dan tokoh masyarakat untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi program kesejahteraan dengan aplikasi SIKS-NG secara berkala. Kegiatan ini dilakukan supaya masyarakat bisa memanfaatkan bantuan yang diberikan pemerintah dengan baik dan benar.

**Wati, Utamajaya, & Pratama (2022)** Efektivitas Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* di Kelurahan Gunung Seteleng Menggunakan Framework TAM. Model Penelitian yang digunakan yaitu *Technology Acceptance Model* (TAM) dengan 4 konstruk. Dari hasil pengukuran didapatkan hasil bahwa variabel PEOU (kemudahan penggunaan) dengan presentase nilai 68, 33% termasuk dalam kategori Efektif, variabel PU (persepsi kegunaan) dengan nilai Presentase 67, 74% termasuk dalam kategori Efektif, variabel ATU (sikap penggunaan) dengan nilai persentase 66, 81% termasuk dalam kategori efektif, dan Variabel ACC (Kepuasan

penggunaan) dengan nilai presentase 68, 22% termasuk kategori efektif, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian keseluruhan dari setiap variabel pengukuran tingkat efektivitas sistem informasi SIKS-NG pada kelurahan gunung seteleng berada pada kategori Efektif.

**Ulum, Rifaâ, & Purwatiningsih (2023)** Efektivitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Berbasis Aplikasi SIKS-NG Di Dinas Sosial Kabupaten Sampang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sampang telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, namun belum optimal karena data masih ditemukan permasalahan mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat tidak sinkron dan data belum *update*. Faktor penghambatnya adalah masih banyak data masyarakat yang tidak sinkron dengan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, penggunaan data penerima bansos belum dimutakhirkan dan data yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Urusannya masih belum terarah secara optimal.

**Purwanti (2023)** Penerapan *E-Government* Pada Aplikasi SIKS-NG di Desa Sihiong Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba. hasil penelitian yang dilakukan, bahwa implementasi aplikasi SIKS-NG dalam pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menghasilkan data yang sesuai dengan kondisi yang sesuai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di lapangan, masalah yang sering muncul dalam proses implementasi yaitu data yang berada di Aplikasi SIKS-NG berupa NIK

keluarga penerima manfaat tidak sesuai dengan data di lapangan sehingga menyebabkan data tersebut tidak bersinergi, sehingga pada saat dilakukan pengusulan DTKS terjadi ketidakcocokan dan ketidakvalidan data dalam *system* aplikasi SIKS-NG.

**Haromin & Andriyansah (2022)** Efektivitas Penerapan *E- Government* Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) Sebagai Aplikasi pengolahan Data Kemiskinan Di Desa Lumanjang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Hasil penelitian ini dilihat dari tiga indikator menurut Richard M. Streers menunjukkan bahwa: Adaptasi, diketahui bahwa program SIKS-NG secara umum memang mudah beradaptasi dan menyesuaikan dengan keadaan masyarakat khususnya masyarakat yang tergolong menengah kebawah dikarenakan kehadiran dari program ini bermuara pada penyaluran bantuan. Dari segi SDM sudah cukup efektif karena Operator SIKS-NG faham dalam mengoperasikan komputer dan faham tentang aplikasi SIKS-NG. Tetapi dari segi sarana dan prasaran dirasa masih belum maksimal karena masih kurangnya perhatian dari desa. Pencapaian Tujuan, diketahui bahwa bantuan yang disalurkan melalui program SIKS-NG dari segi penyalurannya menyesuaikan dengan data yang ada yang berisi masyarakat tergolong kurang mampu sehingga bantuan itu dapat disalurkan kepada masyarakat yang memang membutuhkan tetapi masih belum efektif karena dalam pendataannya tidak dicek secara langsung ke lapangan. Integrasi, pihak yang berwenang dalam memberikan sosialisasi yaitu pemerintah desa, melaksanakan sosialisasinya dengan melibatkan Kepala Dusun, RW dan

RT yang ada di Desa Lamajang agar sosialisasi yang dilangsungkan dapat secara menyeluruh dan dapat berkelanjutan. Kemudian pengetahuan masyarakat terkait dengan fungsi SIKS-NG yang diterima masih kurang efektif sehingga tentunya hal ini menjadi perhatian bagi pihak pemerintah desa agar sosialisasinya lebih dimaksimalkan.

**Windari & Rodiyah (2023)** Efektivitas Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) (Studi di Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan melalui observasi dan wawancara serta menggunakan jenis data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini yang pertama pada indikator pencapaian tujuan peneliti menemukan bahwa pencapaiantujuan dilakukan secara bertahap. Kedua, pada indikator integrasi, Pemerintah Desa Permisan telah melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder di Desa Permisan meskipun hanya di awal kemunculan Aplikasi SIKS-NG. Ketiga yaitu indikator adaptasi, baik sumber daya sarana dan prasarana sudah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan meskipun terus terjadi pengembangan Aplikasi SIKS-NG.

**Husri, Usman, & Mone (2021)** Efektivitas Aplikasi Program Pendataan Kesejahteraan Sosial *Next Generation* Di Kabupaten Gowa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas aplikasi program pendataan kesejahteraan sosial *next generation* di Kabupaten Gowa sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya dilihat dari sisi dalam ketepatan sasaran program masyarakat miskin dan anak terlantar terkait aplikasi program pendataan kesejahteraan sosial sudah berjalan dan

sampai sekarang, aspek sosialisasi program dinas sosial sudah melakukan sosialisasi program aplikasi pendataan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat miskin, untuk pencapaian aplikasi program dinas sosial membuat komitmen dengan aparat pemerintah desa dan kecamatan dengan bantuan dinas pemberdayaan masyarakat desa supaya proses pendataan melalui aplikasi SIKS-NG berjalan di Kelurahan, Desa dan Kecamatan. Selanjutnya untuk pemantauan setelah program yang dilakukan oleh Dinas Sosial sudah cukup efektif dengan memantau masyarakat miskin dan anak terlantar yang sudah di data dan diberikan bantuan setelah mereka diberdayakan yang diberikan pemerintah dengan baik dan benar.

**Fadhilah (2023)** Efektivitas Program Pendataan Kesejahteraan sosial *Next Generation* (SIKS-NG) Sebagai Alat Verifikasi Data Kemiskinan di Kabupaten Brebes. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik analisis data menggunakan analisis Nvivo untuk mendapatkan hasil analisis yang sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi SIKS-NG efektif dalam verifikasi data kemiskinan di Kabupaten Brebes. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil penelitian dari setiap indikator yang sudah ditentukan yaitu meliputi indikator pemahaman program, tercapai tujuan, tepat waktu, ketepatan sasaran, perubahan nyata. Dari lima indikator diatas disimpulkan bahwa Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) sudah efektif.

Berikut rangkuman penelitian terdahulu dalam sebuah tabel:

**Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti dan Tahun	Tujuan dan Metode Penelitian	Teori	Hasil Penelitian
1	Akbar, M. F., Sakbir, S., Malipi, S., & Sahi, N. A. (2023). Implementation of Social Welfare (DTKS) Integrated Data Program through the Next Generation Social Welfare Information System (SIKS NG).	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Program Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG) di Desa Huntu, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif.	Menggunakan teori implemementasi menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari keempat indikator tersebut, terdapat tiga indikator yang dinilai optimal, yaitu komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Sedangkan salah satu indikator lainnya yaitu indikator sumber daya dinilai belum maksimal terlihat dari penggunaan aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial- <i>Next Generation</i> (SIKS-NG) yang sering mengalami gangguan atau kesalahan pada saat penginputan data dan ketidakstabilan. sistem jaringan di wilayah pedesaan Huntu, khususnya di Kantor Desa Hunter.
2	Karniawati, N., & Andiani, Y. (2023). Poverty reduction in Indonesia through utilization of social security fund application.	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan aplikasi dana jaminan sosial. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Menggunakan teori e-government menurut Indrajit (2016) yaitu: elemen Support, elemen Capacity dan elemen value.	Hasil kajian menunjukkan bahwa SIKS-NG merupakan solusi pengelolaan data kemiskinan yang terpadu, efektif, dan efisien. Hal ini berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang mengakhiri kemiskinan di mana pun dan dalam berbagai bentuk. SIKS-NG menerapkan sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

No	Peneliti dan Tahun	Tujuan dan Metode Penelitian	Teori	Hasil Penelitian
3	Oktavianto & Supriyanto (2023). Efektivitas Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation Guna Meningkatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Desa Sirnobojo Kecamatan Benjeng-Gresik).	Penelitian ini bertujuan untuk menyimpulkan suatu masalah atau peristiwa yang sifatnya terbatas serta ikut memberikan gambaran obyektif dari kondisi obyek yang diteliti. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif	Menggunakan teori efektivitas program menurut Budiani (2007) dilihat dari : Ketepatan Sasaran, Program Sosialisasi, Pencapaian Tujuan Program dan Pemantauan Program	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial next generation di Desa Sirnobojo sudah berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dalam aspek ketepatan sasaran program masyarakat miskin sudah benar dan berjalan dengan baik sampai sekarang. Pada aspek sosialisasi program SIKS-NG, bahwa sosialisasi sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kondisi lingkungan dan kemampuan pemerintahan desa yaitu dengan melakukan penyuluhan dibalai Desa, paguyuban PKK, serta kegiatan kemasyarakatan lainnya. Pada aspek tujuan program ini bahwa pemerintahan Desa Sirnobojo berhasil melaksanakan program keajahteraan tersebut dengan baik. Selanjutnya untuk pemantauan, pemerintahan Desa Sirnobojo bersinergi dengan BPD, Kepala Dusun dan tokoh masyarakat untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi program kesejahteraan dengan aplikasi SIKS-NG secara berkala.
4	Wati, F., Utamajaya, J. N., & Pratama, A. (2022). Efektivitas Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation di Kelurahan Gunung Seteleng Menggunakan Framework TAM.	Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas sistem informasi SIKSNG pada kelurahan gunung seteleng apakah penggunaan sistem informasi sudah berjalan dengan efektif.	Menggunakan pengukuran tingkat penerimaan atau Efektifitas SIKS-NG menggunakan framework tam.	Hasil pengukuran menunjukkan bahwa variabel PEOU, PU, ATU, dan ACC pada sistem informasi SIKS-NG di Kelurahan Gunung Seteleng memiliki tingkat efektivitas yang tinggi, dengan masing-masing variabel mencapai persentase di atas 66%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan penelitian menunjukkan bahwa Sistem Informasi SIKS-NG di Kelurahan Gunung Seteleng berada dalam kategori "Efektif".

No	Peneliti dan Tahun	Tujuan dan Metode Penelitian	Teori	Hasil Penelitian
5	Ulum, T., Rifaâ, M., & Purwatiningsih,A. (2023).Efektivitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Berbasis Aplikasi SIKS-NG Di Dinas Sosial Kabupaten Sampang.	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Program Jaminan Kesejahteraan Sosial yang merupakan suatu sistem yang dilaksanakan oleh negara dan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.	Menggunakan teori Pegelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya serig dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi menurut Henry Fayol ada lima fungsi pengelolaan antara lain: Planning (Perencanaan) Organizing (Pengorganisasian) Commanding (Pemberian perintah) Coordinating (Pengkoordinasian) Controlling (Pengawasan).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sampang sesuai regulasi, namun belum optimal karena data tidak sinkron dan terupdate. Kendalanya: NIK, nama, alamat tidak sesuai, data bansos belum mutakhir, dan koordinasi Kementerian Sosial belum optimal.
6	Purwanti, E. H. (2023) berjudul Penerapan <i>E-Government</i> Pada Aplikasi SIKS-NG di Desa Sihiong Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – <i>Next Generation</i> (SIKS-NG) Dalam Meningkatkan Good Governance di Desa Sihiong Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.	Menggunakan teori <i>e-government</i> menurut Indrajit (2016) : elemen Support, elemen Capacity dan elemen value.	Hasil penelitian yang dilakukan, bahwa implementasi aplikasi SIKS-NG dalam pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menghasilkan data yang sesuai dengan kondisi yang sesuai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di lapangan, masalah yang sering muncul dalam proses implementasi yaitu data yang berada di Aplikasi SIKS-NG berupa NIK keluarga penerima manfaat tidak sesuai dengan data di lapangan sehingga menyebabkan data tersebut tidak bersinergi, sehingga pada saat dilakukan pengusulan DTKS terjadi ketidak cocokan.

No	Peneliti dan Tahun	Tujuan dan Metode Penelitian	Teori	Hasil Penelitian
7	Haromin & Andriyansah (2022). Efektivitas Penerapan E- Government Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Sebagai Aplikasi pengolah Dta Kemiskinan Di Desa Lumanjang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan egovernment melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKSNG) sebagai aplikasi pengolah data kemiskinan di Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Menggunakan teori efektivitas program dari Duncan yang dikutip Steers (1985, hal. 53) dalam bukunya “Efektivitas Organisasi”: Adaptasi, pencapaian tujuan dan integrasi	Hasil penelitian ini dilihat dari tiga indikator menunjukkan bahwa: Adaptasi, diketahui bahwa program SIKS-NG secara umum memang mudah beradaptasi dan menyesuaikan dengan keadaan masyarakat. Dari segi SDM sudah cukup efektif. Pencapaian Tujuan, diketahui bahwa bantuan yang disalurkan melalui program SIKS-NG dari segi penyalurannya menyesuaikan dengan data yang ada.
8	Verikah D.W & Isnaini R. (2023). Efektivitas Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) (Studi di Desa Permisian Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas sistem informasi kesejahteraan sosial next generation (SIKS-NG) sebagai aplikasi pengolah data kemiskinan di Desa Permisian Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan melalui observasi dan wawancara serta menggunakan jenis data primer dan sekunder.	Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori efektivitas menurut Steers (1985). Terdapat tiga indikator dalam teori ini yakni pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi	Hasil penelitian ini yang pertama pada indikator pencapaian tujuan peneliti menemukan bahwa pencapaiantujuan dilakukan secara bertahap. Kedua, pada indikator integrasi, Pemerintah Desa telah melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder di Desa Permisian meskipun hanya di awal kemunculan Aplikasi SIKS-NG. Ketiga yaitu indikator adaptasi, baik sumber daya sarana dan prasarana sudahsesuai dengan kebutuhan yang diperlukan meskipun terus terjadi pengembangan Aplikasi SIKS-NG.

No	Peneliti dan Tahun	Tujuan dan Metode Penelitian	Teori	Hasil Penelitian
9	Husri, H., Usman, D., & Mone, A. (2021). Efektivitas Aplikasi Program Pendataan Kesejahteraan Sosial Next Generation Di Kabupaten Gowa.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas aplikasi program pendataan kesejahteraan sosial Next Generation di Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Menggunakan teori efektivitas program menurut Budiani (2007) dilihat dari : Ketepatan Sasaran, Program Sosialisasi, Pencapaian Tujuan Program dan Pemantauan Program	Penelitian menunjukkan efektivitas aplikasi pendataan kesejahteraan sosial di Kabupaten Gowa. Program ini berhasil tepat sasaran untuk masyarakat miskin dan anak terlantar. Dinas sosial telah aktif dalam sosialisasi program kepada masyarakat dan berkomitmen dengan aparat pemerintah desa dan kecamatan, serta mendapat dukungan dari dinas pemberdayaan masyarakat desa.
10	Fadhilah, B. A. (2023). Efektivitas Program Pendataan Kesejahteraan sosial Next Generation (SIKS-NG) Sebagai Alat Verifikasi Data Kemsikinan di Kabupaten Brebes.	Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana efektivitas aplikasi SIKS-NG sebagai alat verifikasi data kemiskinan di Kabupaten Brebes, dan untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang ada dalam proses pengelolaan aplikasi SIKS-NG sebagai alat verifikasi data kemiskinan di Kabupaten Brebes. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.	Menggunakan teori efektivitas Menurut Sutrisno (2007) dilihat dari: indikator pemahaman program, tercapai tujuan, tepat waktu, ketepatan sasaran, perubahan nyata	Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan aplikasi SIKS-NG efektif dalam verifikasi data kemiskinan di Kabupaten Brebes. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil penelitian dari setiap indikator yang sudah ditentukan yaitu meliputi indikator pemahaman program, tercapai tujuan, tepat waktu, ketepatan sasaran, perubahan nyata. Dari lima indikator diatas disimpulkan bahwa Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial <i>Next Generation</i> (SIKS-NG) sudah efektif.

Sumber : Diolah Peneliti, 2024

Penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis yaitu berjudul “Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* Dalam Pendataan Kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan”. Berdasarkan kesepuluh penelitian terdahulu diatas, terdapat perbedaan dalam penulisan yaitu perbedaan lokasi dan waktu yang berbeda serta teori dalam penelitian ini menggunakan dua teori efektivitas program menurut Budiani (2007) dan Sutrisno (2007). Sedangkan penelitian terdahulu ada beberapa yang menggunakan teori efektivitas organisasi menurut Steers (1985) dan ada yang menggunakan teori *e-goverment* menurut indrajid (2016).

## **1.7 Tinjauan Pustaka**

Dalam suatu penelitian, dibutuhkan teori-teori yang dapat mendukung penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka adalah penjelasan yang harus berisi tentang pernyataan-pernyataan peneliti sebelumnya mengenai penelitian yang sama yang dikerjakan. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

### **1.7.1 Administrasi Publik**

Administrasi berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan berdasarkan pembagian tugas sesuai dengan kesepakatan bersama (Marliani, 2019, hal. 18) Stephen Robbins dalam Astuti, Warsono, & Rachim (2020) mengatakan administrasi merupakan keseluruhan proses dari aktivitas-aktivitas pencapaian tujuan secara efisien dengan dan melalui orang lain. Pendapat ini juga didukung Waldo yang menyatakan administrasi suatu daya upaya manusia yang kooperatif, yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi.

Menurut Y. Wayong dalam Suardita (2016, hal. 4), administrasi publik adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan usaha-usaha instansi yang pemerintah agar tujuannya tercapai. Chandler dan Plano dalam Marliani (2018) mengemukakan bahwa: "Administrasi Publik adalah suatu proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisasikan dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan publik". Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen afara sesuai dengan nilai

efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik. Administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan publik.

Shafritz (2018) menjelaskan bahwa administrasi publik mengarah pada dua kegiatan yang terpisah namun terkait, yaitu (1) profesionalisme dan (2) bidang akademik, yang bertujuan untuk menafsirkan, berkolaborasi, mengevaluasi dan meningkatkan implementasi profesional dan pelatihan para praktisinya. Menurut

Nigro (1970) sebagai berikut :

1. *(Public Administration) is cooperative group effort in public setting* (merupakan usaha kelompok untuk bekerjasama dalam pengaturan publik).
2. *(Public Administration) covers all three branches : executive, legislative and judicial, and their interrelationship.* (tiga cabang yang terdapat dalam Administrasi publik adalah : legislatif, eksekutif, dan yudikatif beserta keterkaitannya antar ketiganya).
3. *(Public Administration) has important role formulating of public policy and is thus a part of the political proses.* (Administrasi publik memainkan peran penting dalam pengembangan kebijakan publik dan karena itu merupakan bagian dari proses politik).
4. *(Public Administrastion) is cosely associated with numerous private group and individuals in providing services to the community.* (administrasi publik

sangat erat kaitannya dengan kelompok swasta dan individu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat).

5. *(Public Administration) is different in significant ways from private administration.* (Administrasi publik memiliki perbedaan tujuan yang signifikan dari administrasi privat). ”

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dijelaskan bahwa administrasi publik mencakup segala bentuk kerjasama dalam negara, yang meliputi kekuasaan cabang *eksekutif, legislatif dan yudikatif* tentang bagaimana mengatur, membiayai, memobilisasi, mengorganisasi serta mengevaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang layak dicapai.

### **1.7.2 Paradigma Administrasi Publik**

Paradigma diartikan sebagai sebuah pandangan atau cara memandang sesuatu secara mendasar untuk mengkaji ataupun menelaah sebuah permasalahan. Administrasi Publik sebagai salah satu disiplin ilmu telah mengalami berbagai macam perkembangan, perkembangan administrasi publik ini karena adanya pergeseran paradigma. Menurut Henry (2017) terdapat enam paradigma dalam administrasi publik, yaitu:

- a) Pertama, Dikotomi politik administrasi tahun 1900-1926, pada paradigma pertama yang ditekankan adalah posisi di mana sebenarnya administrasi publik harus berada. Administrasi seharusnya berlokus di suatu birokrasi pemerintah dan tidak diperhatikan apa fokusnya.

- b) Kedua, paradigma prinsip-prinsip dalam administrasi pada tahun 1927-1937. Pada paradigma ini terjadi perkembangan pesat dari teori-teori administrasi, banyak penelitian-penelitian terkait administrasi publik, universitas dan akademi juga membuka program administrasi publik pada paradigma kedua ini, paradigma kedua berkenaan dengan fokus administrasi publik, bagaimana prinsip-prinsip administrasi publik. Lokus tidak lagi dipermasalahkan, karena pada paradigma ini administrasi publik diartikan secara luas tidak hanya pada sebuah birokrasi pemerintah, tapi di segala organisasi baik publik maupun privat.
- c) Ketiga, Administrasi publik sebagai ilmu politik, dari tahun 1950 hingga 1970. Dalam paradigma ini, administrasi publik kembali ke ilmu politik. Paradigma ini dianggap sebagai proses peninjauan kembali bentuk konseptual dari administrasi publik dan ilmu politik. Bahkan pada tahun 1962, administrasi publik tidak masuk dalam subbidang ilmu politik dalam laporan *American political science association*.
- d) Keempat, administrasi publik sebagai ilmu administrasi, pada, tahun 1956 sampai 1970, pada paradigma ini kembali menemukan fokus yaitu pada manajemen umum dan ilmu administrasi tetapi belum menemukan lokus yang jelas karena dianggap di organisasi manapun berlaku.
- e) Kelima, Administasi publik sebagai administrasi publik, mulai tahun 1970, pada paradigma ini administrasi publik sebagai bidang ilmu pengetahuan diakui, administrasi publik pada paradigma ini penekanan ditempatkan pada

masalah publik dan kepentingan publik, sedangkan penekanan ditempatkan pada teori organisasi, ilmu manajemen, kebijakan publik, dan ekonomi.

- f) *Governance* (1990-Sekarang), pada paradigma ini ditekankan perubahan konsep pemerintahan dengan administrasi. Perubahan dicatat kedalam tiga kategori, yaitu globalisasi, redefinisi dan desentralisasi. Globalisasi mengkolaborasikan perusahaan, teknologi, lingkungan dan perdagangan internasional. Definisikan kembali proses aktual dari kekuatan hierarkis ke kolaborasi dan kemitraan. Fokus desentralisasi adalah partisipasi warga, Kelompok masyarakat dan kemitraan publik serta swasta. Pemerintah berkontribusi pada sektor swasta, masyarakat, serta teknologi untuk menyelesaikan kebijakan dan masalah publik.

Pada uraian paradigma di atas, penelitian ini masuk ke dalam paradigma ke-6 (enam) yaitu *Governance*. Dalam paradigma ke-6 dijelaskan bahwa Pemerintah turut berkontribusi untuk menyelesaikan kebijakan dan masalah publik, artinya paradigma ini dilaksanakan oleh pemerintahan untuk meningkatkan kualitas layanan yang merupakan agenda besar reformasi birokrasi. Administrasi Publik mempunyai dua konsentrasi yakni manajemen publik dan kebijakan publik. Penelitian ini memfokuskan pada kebijakan publik karena aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) dalam pendataan kemiskinan masuk ke dalam permasalahan kebijakan publik.

### 1.7.3 Kebijakan Publik

Dalam pandangan Carl Friedrich dalam Suwitri (2014), kebijakan adalah suatu kegiatan menuju suatu arah yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu karena adanya hambatan dalam menemukan cara untuk mencapai atau menciptakan suatu tujuan yang diinginkan. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan oleh pemerintah untuk melakukan suatu kegiatan yang berlangsung di masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya kebijakan juga merupakan sekumpulan tindakan/kegiatan yang diajukan oleh individu, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan peluang dalam melaksanakan kebijakan yang diusulkan untuk mencapai tujuan tertentu. Nasihat ini juga menunjukkan bahwa konsep kebijakan, yang mencakup perilaku yang diinginkan, merupakan bagian penting dari definisi kebijakan, karena untuk beberapa kegiatan kebijakan harus sampai batas tertentu mencerminkan apa yang sebenarnya dilakukan, bukan apa yang diusulkan.

Irfan Islamy sebagaimana disebutkan dalam Suwitri (2014) perlu dibedakan antara kebijakan dengan kebijaksanaan. Politik diterjemahkan dengan hikmah dalam arti lain yang berarti kebijaksanaan. Gagasan kebijaksanaan membutuhkan pertimbangan lebih lanjut, sedangkan politik mencakup aturan-aturan yang terkandung di dalamnya. James E. Anderson sebagaimana dikutip Islamy dalam Suwitri (2014) mengemukakan bahwa kebijakan adalah *“a purposive course of action*

*followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”*

(Serangkaian tindakan dengan tujuan tertentu, dilaksanakan dan dilakukan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor untuk memecahkan masalah tertentu).

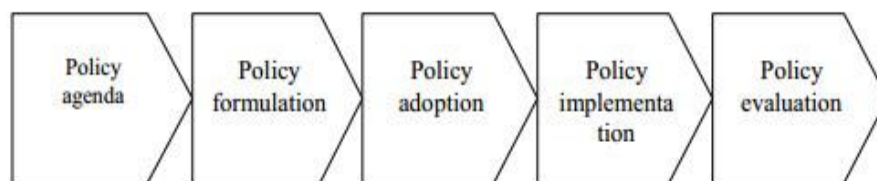
Selain itu, dari segi terminologis, terdapat banyak definisi kebijakan publik tergantung dari sudut penafsirannya. Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai kewajiban distribusi nilai-nilai kepada masyarakat secara keseluruhan atau distribusi nilai-nilai wajib bagi seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mendefinisikan kebijakan publik sebagai program tujuan, nilai, dan praktik yang ditargetkan yang dirancang untuk mencapai tujuan. Dikutip Robert Easton dalam Agustino (2008) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara institusi publik dengan lingkungannya. Banyak orang menganggap definisi ini terlalu luas untuk dipahami karena istilah “kebijakan publik” dapat mencakup banyak hal.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik dapat disimpulkan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah untuk mengatasi hambatan dalam mencapai tujuan tertentu yang diinginkan oleh masyarakat. Kebijakan publik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi nilai-nilai dan pelaksanaan program-program yang ditujukan untuk memecahkan masalah tertentu.

### 1.7.4 Proses Kebijakan Publik

James E. Anderson, David W. Brandy dan Charles Bullock III yang dikutip Riant (2017:538) membagi proses kebijakan dalam lima tahapan, yaitu:

- a) Agenda kebijakan, pada tahap agenda kebijakan dilakukan prioritas terhadap masalah-masalah serius yang hendak diselesaikan.
- b) Formulasi kebijakan, pada tahap ini dilakukan pengembangan terhadap pilhan atau alternatif tindakan atau program untuk menyelesaikan masalah.
- c) Adopsi/penentuan kebijakan, mengembangkan salah satu alternatif yang telah disepakati, yang selanjutnya dilakukan pelegalan atau pengesahan.
- d) Implementasi kebijakan, pengaplikasian atau pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah.
- e) Evaluasi kebijakan, melihat efektivitas kebijakan dalam penyelesaian masalah.



**Gambar 1.2 Tahapan Proses Kebijakan menurut J. Anderson**

Sumber: Riant Nugroho

Tahapan yang hampir sama juga dikemukakan oleh Thomas R. Dye dalam Riant (2017:539), Dye membagi tahapan kebijakan dalam enam fase yakni pertama identifikasi masalah (*problem identification*), kedua agenda *setting*, ketiga *policy*

*formulation*, keempat *policy legitimation*, kelima *policy implementation*, keenam *policy evaluation*. Riant Nugroho (2017:185) mengemukakan bahwa isu kebijakan haruslah bersifat strategis, yakni bersifat mendasar, menyangkut banyak orang atau keselamatan bersama, (biasanya) berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan oleh orang-seorang dan memang harus diselesaikan serta menjadi agenda politik untuk diselesaikan.

Dalam penelitian ini difokuskan pada proses tahapan kebijakan kelima yaitu evaluasi kebijakan, penelitian ini berfokus pada tahap di mana efektivitas suatu kebijakan diukur dalam hal kemampuannya menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi. Dengan demikian, penelitian ini secara mendalam mengevaluasi keberhasilan kebijakan dalam konteks penerapan SIKS-NG dalam pendataan kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan, sekaligus berkontribusi pada perbaikan ke depan melalui pembelajaran dari hasil evaluasi tersebut.

### **1.7.5 Efektifitas**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Sedarmayanti (2009, hal. 59) mendefinisikan bahwa konsep efektivitas sebagai suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya maka dikatakan efektif, sedangkan kalau tujuan atau sasaran itu tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka pekerjaan itu tidak efektif (H. Emerson dalam Handayanigrat (1994, hal. 16).

Menurut Budiani (2007) efektivitas adalah kesesuaian antara *output* dengan tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya menurut Pekei (2016) efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Abdurahmat (2003) efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.

Berdasarkan uraian di atas dapat di jelaskan bahwa efektivitas mengacu pada sejauh mana tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Konsep ini

menekankan hasil guna dan ketepatan dalam mencapai target. Suatu program dianggap efektif jika hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

#### **1.7.5.1 Ukuran Efektivitas**

Efektivitas berfokus pada hasil program atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Berdasarkan tolak ukur menurut Budiani (2007) dalam bukunya efektivitas program menyatakan bahwa untuk mengukur faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel berikut ini:

1. Ketepatan Sasaran Program Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.
2. Sosialisasi Program Sosialisasi program yaitu kemampuan pelaksana program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada umumnya.
3. Tujuan Program Tujuan program adalah sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Pemantauan Program Pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program (Budiani, 2007)

Pengukuran efektivitas program menurut Sutrisno (2007) yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman Program, yaitu untuk mengetahui sejauh mana masyarakat dapat memahami program. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Dengan memperhatikan kelompok sasaran maka suatu program dapat dikatakan efektif atau tidak.
2. Tepat Sasaran, yaitu bagaimana program yang dirancang oleh pengelola kepada kelompok sasaran atau sejauhmana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.
3. Tepat Waktu, yaitu untuk penggunaan waktu dalam pelaksanaan program, harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Dengan waktu yang tepat maka program akan berjalan efektif.
4. Tercapainya Tujuan, yaitu untuk mengetahui apakah tujuan dari dibentuknya program sudah tercapai atau belum.
5. Perubahan Nyata, yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk perubahan nyata sebelum dan sesudah adanya program tersebut. Sehingga dapat diukur melalui sejauh mana program tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat.

Sedangkan pengukuran efektivitas menurut Campbel dalam Saragih (2017) pengukuran efektivitas adalah Keberhasilan program, Keberhasilan sasaran, Kepuasan terhadap program, Tingkat *output* dan *Input* dan Pencapaian Program.

- 1) Keberhasilan program., yaitu efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program dapat di tinjau dari proses dan mekanisme suatu kegiatan dilakukan dilapangan.
- 2) Keberhasilan sasaran, yaitu efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan perhatian terhadap aspek *output*, artinya efektifitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat *output* dalam kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepuasan terhadap program, yaitu kepuasan merupakan kriteria efektifitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Kepuasan dirasakan oleh para pengguna terhadap kuliatas produk atau jasa yang dihasilkan. Semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh pengguna semakin tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan bagi lembaga.
- 3) Tingkat *input* dan *output*, yaitu pada efektifitas tingkat input dan output dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*). Jika *output* lebih besar dari input maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika *input* lebih besar dari *output* maka dapat dikatakan tidak efisien.
- 4) Pencapaian tujuan menyeluruh, yaitu sejauhmana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini merupakan penilaian umum dengan sebanyak mungkin kriteria tunggal dan menghasilkan penilaian umum

efektifitas organisasi. Sehingga efektifitas program dapat dijalankan berdasarkan dengan kemampuan operasionalnya dalam melaksanakan program yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektifitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pengukuran merupakan penilaian dalam arti tercapainya sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sasaran yang tersedia. Jelasnya bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya adalah efektif. Jadi, apabila suatu tujuan atau sasaran itu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka tidak efektif. Dalam sebuah efektivitas diperlukan adanya prosedur, strategi, kebijaksanaan, program dan pedoman. Tercapainya tujuan itu adalah efektif sebab mempunyai efek atau pengaruh yang besar terhadap kepentingan bersama.

#### **1.7.6 Faktor Pendukung dan Penghambat**

Faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi efektivitas suatu program menurut Wati (2022) sebagai berikut :

Faktor Pendukung :

- 1) Adanya Dukungan Bimbingan Teknis dan atau Pelatihan untuk operator SIKS-NG

Bimbingan teknis dan pelatihan untuk operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) adalah langkah penting dalam memastikan bahwa para operator memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengoperasikan dan mengelola sistem ini dengan efektif.

Dukungan ini mencakup:

- a. Pelatihan Teknis: Memberikan pemahaman tentang bagaimana menggunakan perangkat lunak SIKS-NG, termasuk input data, pengolahan data, dan cara menghasilkan laporan.
- b. Bimbingan Praktis: Sesi bimbingan yang berfokus pada aplikasi praktis dari teori yang telah dipelajari, seperti simulasi penggunaan sistem dan pemecahan masalah yang sering dihadapi.
- c. *Update* Berkala: Penyediaan informasi terbaru mengenai pembaruan atau perubahan dalam sistem, sehingga operator selalu *up-to-date* dengan teknologi dan prosedur terbaru.
- d. Pendampingan: Bantuan langsung dari para ahli atau fasilitator untuk membantu operator dalam mengatasi kendala yang mungkin mereka hadapi saat menggunakan sistem.

## 2) Adanya Sarana Pendukung bagi Pelaksana Pengelola Data

Sarana pendukung bagi pelaksana pengelola data mencakup semua infrastruktur dan peralatan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas pengelolaan data dengan efektif.

Sarana ini meliputi:

- a. Perangkat Keras: Komputer, *server*, dan perangkat jaringan yang memadai untuk mendukung operasional sistem SIKS-NG.
- b. Perangkat Lunak: Aplikasi dan perangkat lunak pendukung lainnya yang diperlukan untuk memproses, menyimpan, dan mengelola data.
- c. Akses Internet: Koneksi internet yang stabil dan cepat untuk memastikan kelancaran akses dan pengiriman data.
- d. Ruang Kerja yang Memadai: Lingkungan kerja yang nyaman dan ergonomis untuk para operator dan pengelola data, termasuk meja, kursi, dan pencahayaan yang sesuai.
- e. Sistem Keamanan: Pengamanan data yang kuat untuk melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah.

### 3) Dukungan Masyarakat

Dukungan masyarakat adalah faktor kunci yang dapat memperlancar implementasi dan operasional SIKS-NG. Dukungan ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain:

- a. Partisipasi Aktif: Masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam program-program sosial dan menggunakan layanan yang disediakan oleh SIKS-NG, serta memberikan data yang akurat dan lengkap.
- b. Kesadaran dan Pengertian: Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sistem informasi kesejahteraan sosial dan

bagaimana kontribusi mereka dapat membantu peningkatan kualitas layanan.

- c. Kerjasama: Kolaborasi antara masyarakat dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan instansi terkait lainnya dalam mendukung pengumpulan dan pengelolaan data.
- d. Dukungan Moral dan Sosial: Memberikan dukungan moral kepada para operator dan pengelola data, serta membantu menciptakan lingkungan sosial yang mendukung kelancaran operasional SIKS-NG.

Faktor Penghambat :

- 1) Banyak Data Masyarakat Yang Tidak Sinkron Dengan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Ketidaksinkronan data masyarakat dengan data yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) adalah masalah yang sering terjadi. Faktor ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti:

- a. Perubahan Data: Ada perubahan data kependudukan seperti alamat, status pernikahan, atau anggota keluarga yang tidak segera dilaporkan dan diperbarui di Disdukcapil.
- b. Keterbatasan Akses: Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan akses terhadap layanan Disdukcapil mungkin mengalami kesulitan dalam memperbarui data mereka.

- c. Kurangnya Sosialisasi: Tidak semua masyarakat memahami pentingnya memperbarui data kependudukan mereka atau mengetahui prosedur yang harus dilakukan.
- d. Proses Administrasi: Proses administrasi yang lambat atau rumit di Disdukcapil juga dapat menjadi kendala dalam sinkronisasi data. Akibat dari ketidaksinkronan ini, berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial, dapat terhambat karena data yang tidak akurat dapat menyebabkan distribusi bantuan yang tidak tepat sasaran.

2) Penggunaan Data Penerima bantuan sosial banyak yang belum terupdate. Penggunaan data penerima bantuan sosial yang belum terupdate mengacu pada kondisi di mana data yang digunakan untuk mendistribusikan bantuan sosial tidak mencerminkan kondisi terkini dari para penerima manfaat.

Faktor ini bisa disebabkan oleh:

- a. Perubahan Kondisi Ekonomi: Kondisi ekonomi penerima bantuan dapat berubah, seperti adanya penurunan pendapatan atau kehilangan pekerjaan, yang seharusnya mengubah status kelayakan mereka.
- b. Migrasi: Penerima bantuan yang pindah tempat tinggal tetapi belum melaporkan perubahan alamatnya, menyebabkan data lokasi yang tidak akurat.
- c. Kematian atau Perubahan Status: Kematian atau perubahan status keluarga (misalnya, anak yang sudah dewasa dan bekerja) yang tidak tercatat.

- d. Kurangnya Pembaruan Data Berkala: Data yang tidak diperbarui secara berkala oleh instansi terkait, baik karena kurangnya sumber daya atau prosedur pembaruan yang tidak efektif. Konsekuensi dari data yang tidak terupdate ini adalah kemungkinan terjadinya penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran, baik itu karena ada orang yang sudah tidak layak tetapi masih menerima bantuan, atau orang yang seharusnya menerima tetapi tidak terdaftar.

#### **1.7.7 Sistem Informasi**

Sistem informasi adalah sebuah sistem yang terintegrasi yang mampu menyediakan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi orang-orang ataupun bagi penggunanya. Sistem informasi melalui interaksi antara orang, proses, data, dan teknologi dalam mendukung operasi suatu organisasi. Sistem informasi Pemerintah Daerah menurut Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah (Permendagri, 2019).

“Secara sederhana suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu.” (Lucas, 1987, hal. 5)

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa sistem merupakan komponen yang terorganisasi yang saling tergantung satu sama lain, saling berinteraksi dan saling terorganisasi.

“Sistem informasi adalah kombinasi antara manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mengatur jaringan komunikasi yang penting, proses transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat.” (Nash, 1995, hal. 8)

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa sistem informasi merupakan kombinasi antara manusia dengan alat teknologi untuk mengelola data yang telah direncanakan oleh suatu organisasi agar mencapai tujuan yang diinginkan dan menemukan solusi dalam mempermudah suatu pekerjaan ataupun program yang sedang dilaksanakan.

“Sistem informasi adalah yang dilakukan atau diselenggarakan untuk mengumpulkan, memasukan, mengolah dan menyimpan data yang terorganisir agar suatu organisasi dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.” (Romney, 1997, hal. 16).

Selanjutnya Mulyanto dalam Kuswara & Kusmana (2017) menyatakan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem yang terdiri dari kumpulan beberapa komponen sistem yaitu *software*, *hardware* dan *brainware* yang memproses informasi menjadi sebuah *output* yang berguna untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam suatu organisasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam suatu sistem informasi terdapat beberapa komponen agar menghasilkan sebuah hasil yang mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh organisasi.

### 1.7.8 Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi atau keadaan yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara didalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar warga negara tersebut dapat hidup dengan layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga Warga Negara bisa melaksanakan fungsi sosialnya.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009 kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan sosial masyarakat negara agar mendapatkan kehidupan yang layak dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini adalah bagian dari upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap masyarakat yang meliputi rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial (Pemerintah Pusat Indonesia, 2009).

Sedangkan Badan Pusat Statistik dalam publikasi data dan informasi kemiskinan, kesejahteraan sosial adalah kesejahteraan yang meliputi bidang kehidupan yang sangat luas dan aspeknya tidak bisa diukur (BPS, 2009). Kesejahteraan dalam konsep dunia *modern* yaitu suatu kondisi dimana individu dapat memenuhi kebutuhan pokok, seperti kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak, air bersih dan berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan pekerjaan yang memadai sehingga dapat menunjang kualitas kehidupan dan memiliki status sosial yang sama terhadap sesama.

“Kesejahteraan Sosial terdiri dari tiga unsur yaitu : pertama , setinggi apa masalah sosial yang di kuasai, kedua , sebanyak apa kebutuhan terpenuhi , dan yang ketiga , setinggi apa kesempatan untuk maju. Tiga unsur tersebut berlaku bagi individu, kelompok maupun organisasi dan seluruh masyarakat.” Midgley dalam Suud (2006, hal. 5)

Dengan ini maka, kesejahteraan sosial bisa dikatakan sebagai kegiatan yang terorganisasikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial, melalui pemberian bantuan kepada masyarakat miskin atau tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesejahteraan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar kehidupan dan hubungan sosial.

“kesejahteraan sosial adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu, lembaga sosial , masyarakat maupun badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial atau tunjangan sosial. Suharto (2006, hal. 3)

Berdasarkan dua pengertian di atas dapat dikatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan sosial, material, dan ekonomi warga negara tanpa terkecuali berlaku bagi setiap individu, kelompok maupun organisasi melalui pemberian pelayanan sosial atau tunjangan sosial dari Pemerintah agar dapat hidup dengan layak dan terpenuhinya kebutuhan dasar.

#### **1.7.8.1 Komponen Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial selain memiliki tujuan dan fungsi yang sangat penting bagi yang mempelajarinya, kesejahteraan sosial juga memiliki beberapa komponen - komponen yang tidak kalah jauh penting. Komponen-komponen tersebut menjadi suatu pembeda antara kesejahteraan sosial dengan kegiatankegiatan lainnya.

Dikutip dalam Fahrudin (2012, hal. 16) komponen-komponen dalam kesejahteraan sosial antara lain :

1) Organisasi formal

Usaha kesejahteraan sosial terorganisasi secara formal dan dilaksanakan oleh organisasi/badan sosial yang formal pula.

2) Pendanaan

Tanggung jawab dalam kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan juga tanggung jawab masyarakat.

3) Tuntutan kebutuhan manusia

Kesejahteraan sosial harus memandang kebutuhan manusia secara keseluruhan, dan tidak hanya memandang manusia dari satu aspek saja, hal inilah yang membedakan pelayanan kesejahteraan sosial dengan yang lainnya. Pelayanan kesejahteraan sosial diadakan karena tuntutan kebutuhan manusia.

4) Profesionalisme

Pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara profesional berdasarkan kaidah ilmiah, terstruktur, sistematis, dan menggunakan metoda dan teknik-teknik pekerjaan sosial dalam praktiknya.

5) Kebijakan

Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang oleh seperangkat perundang-undangan yang mengatur syarat memperoleh, proses pelayanan dan pengakhiran pelayanan.

6) Peran serta masyarakat

Usaha kesejahteraan sosial harus melibatkan peran serta masyarakat agar dapat berhasil dan memberi manfaat kepada masyarakat. Peran serta masyarakat dalam hal ini adalah peran serta dari para penyandang disabilitas untuk dapat turut serta berpartisipasi dalam mengikuti program peningkatan kapasitas diri ini untuk meningkatkan keterampilannya.

7) Data dan informasi kesejahteraan sosial

Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang dengan data dan informasi yang tepat. Tanpa data dan informasi yang tepat maka pelayanan akan tidak efektif dan tidak tepat sasaran.

### **1.7.9 Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG)**

Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) merupakan sistem pengelolaan, pengumpulan, penyajian, penyimpanan data yang dikembangkan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial. Sistem ini dibangun mulai pertengahan tahun 2017, SIKS-NG diperkenalkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial dengan melakukan bimbingan teknis (Bimtek). Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) memuat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang bertujuan untuk melakukan verifikasi dan validasi data bagi penerima bantuan dengan menghadirkan data yang akurat khususnya untuk penanggulangan kemiskinan yang terjadi di

Indonesia. SIKS-NG ini berfungsi untuk proses perbaikan dan pengusulan baru data basis terpadu yang mana didalam nya terdapat modul untuk perbaikan dan pengusulan data bantuan sosial. Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan menerapkan SIKS-NG pada awal tahun 2019. SIKS-NG ini digunakan untuk mendata penerima bantuan sosial sebagai berikut :

1. Program keluarga harapan (PKH)

Program keluarga harapan merupakan program bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin atau tidak mampu yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat. Berikut ini adalah kriteria penerima program keluarga harapan (PKH):

A. Kriteria Komponen Kesehatan

- a) Ibu hamil, maksimal 2 tahun kali kehamilan.
- b) Anak usia 0 sampai 6 tahun, maksimal dua anak.

B. Kriteria Komponen Pendidikan

- a) Anak sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat.
- b) Anak sekolah menengah pertama ( SMP ).
- c) Anak Tsanawiyah ( Mts )atau sederajat.
- d) Anak sekolah menengah atas ( SMA ). Madrasah Aliyah atau sederajat.
- e) Anak usia 6 s/d 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

### C. Kriteria Komponen Kesejahteraan Sosial

- a) Lanjut usia mulai 60 tahun keatas, maksimal satu orang dan berada dalam keluarga
- b) Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat, maksimal satu orang dan berada dalam keluarga.

#### 2. Bantuan pangan non tunai (BPNT)

Bantuan pangan non tunai merupakan bantuan sosial berupa sembako, tidak diberikan dalam bentuk barang melainkan dalam bentuk uang yang dikirim ke nomor rekening penerima bantuan melalui himpunan bank himbara. Syarat untuk bisa mendapatkan bantuan pangan non tunai (BPNT) diantaranya adalah:

- a) KPM yang menerima BPNT harus terdaftar dalam data BDT.
- b) Data BDT merupakan Basis Data Terpadu untuk mendata nama dan alamat ( BNBA ) 40% penduduk termiskin di Kabupaten/Kota.
- c) KPM penerima BPNT terdiri dari KPM PKH dan KPM non PKH.

#### 3. Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Kartu Indonesia Pintar merupakan bantuan tunai pendidikan kepada anak usia 6 sampai 21 tahun . Program ini dicanangkan untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin atau rentan miskin tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah. Untuk bisa mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) diantaranya adalah :

- a) Anak usia 6 hingga 21 tahun

- b) Berasal dari keluarga miskin,rentan miskin : pemiliki kartu keluarga harapan (PKH), yatim piatu, penyandangf disabilitas, korban bencana alam/musibah.

#### 4. PBI JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Bantuan PBI JK N/Kartu Indonesia Sehat bertujuan untuk memberikan kemudahan akses dan mengurangi beban finansial bagi masyarakat miskin dalam mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Bantuan ini berupa bantuan layanan kesehatan gratis di puskesmas, klinik maupun dirumah sakit di seluruh wilayah di Indonesia. Sasaran pengguna PBI JKN/ Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah sebagai berikut :

- a) Anak-anak Panti Asuhan
- b) Orang Lanjut Usia
- c) Orang Cacat
- d) Mantan Pecandu
- e) Mantan PSK

Kelompok inilah yang dikategorikan oleh Pemerintah sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menjadi sasaran utama Program Kartu PBI JKN/ Indonesia Sehat (KIS). Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan dalam melakukan program pemuktahiran data melalui SIKS-NG memiliki prosedur khusus bagi masyarakat yang melakukan pendaftaran data bantuan sosial bagi fakir miskin berikut ini adalah prosedur yang digunakan :



**Gambar 1.3** Prosedur Pendataan Melalui SIKS-NG

Sumber : Website Pusdatin (2024)

Berdasarkan Gambar 1.3 di atas dapat diketahui bahwa prosedur pendataan melalui SIKS-NG terdiri dari :

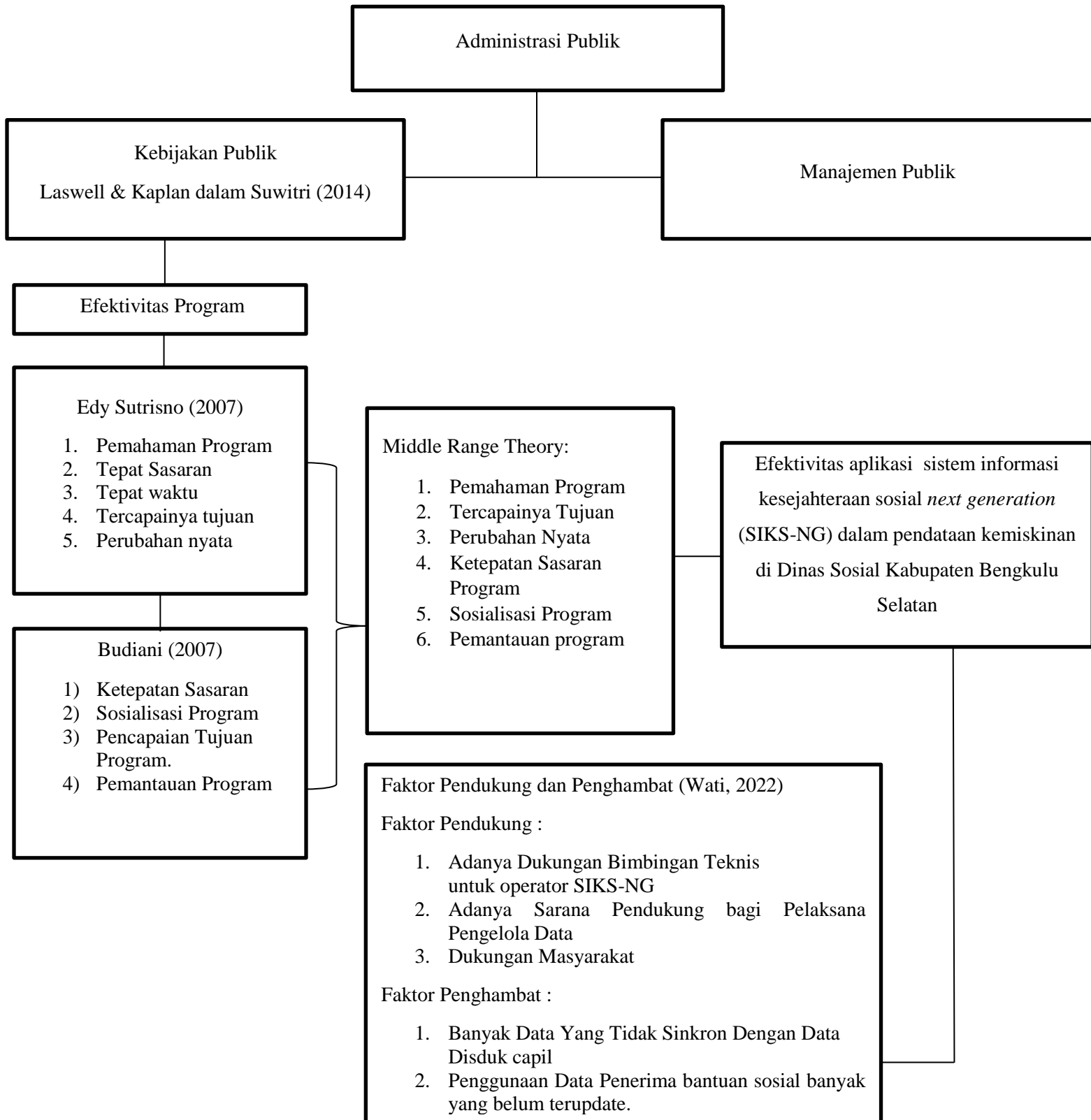
- a) Pemohon mendaftarkan diri ke Kepala Desa/Lurah membawa KTP dan KK.
- b) Lurah/Kepala Desa menyampaikan data pendaftaran ke Bupati/Walikota melalui Camat. Selanjutnya Bupati/Walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi data ke Menteri melalui Gubernur.
- c) Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi data pendaftaran rumah tangga miskin.
- d) Menteri Sosial menetapkan data terpadu kesejahteraan sosial.
- e) Pemanfaatan data dilakukan oleh Kementerian Lembaga/Daerah.

- f) Pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan kepada masyarakat yang terdaftar.

Prosedur pendaftaran mengenai pendaftaran data fakir miskin agar mendapatkan bantuan sosial ini telah dibuat oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial sebagai cara proses pendataan masyarakat miskin agar terverifikasi dan tervalidasi dan mendapatkan bantuan sosial melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) terlaksana dengan efektif.

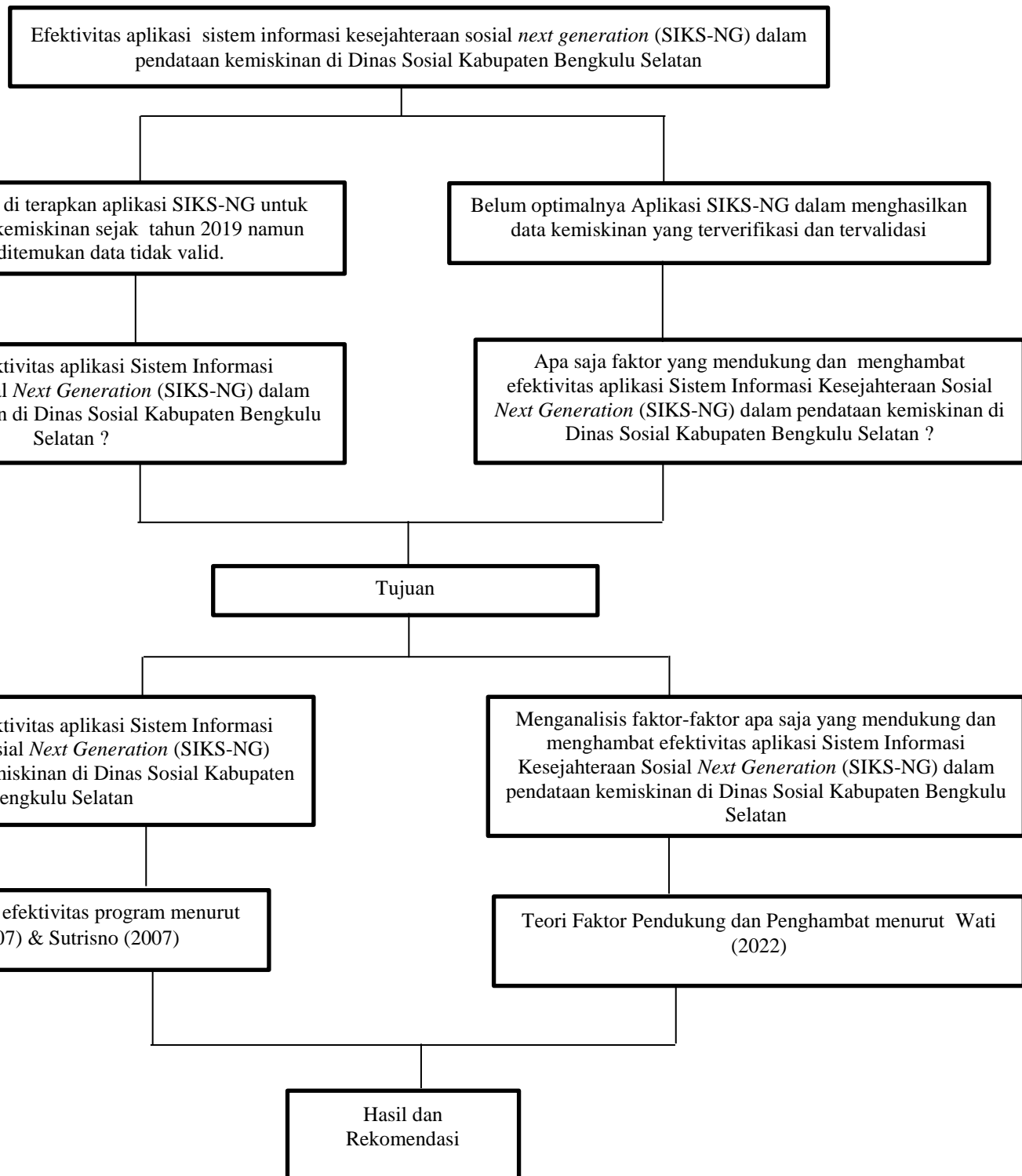
#### **1.7.10 Kerangka Pemikiran**

Kerangka Pemikiran adalah gambaran masalah yang menjelaskan bentuk hubungan antar variabel di dalam penelitian. Tahapan ini dilakukan untuk membentuk permasalahan yang ada sehingga penelitian terfokus dengan baik dan tidak keluar dari topik permasalahan. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus topik permasalahan efektivitas aplikasi melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) dalam pendataan kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan. Adapun kerangka pikir penelitian dan kerangka pikir teori yang dipakai adalah sebagai berikut :



**Gambar 1.4 Kerangkar Pikir Teori**

Sumber : Diolah Peneliti. 2024



**Gambar 1.5 Kerangkar Pikir Penelitian**

Sumber : Diolah Peneliti. 2024

### **1.7.11 Operasionalisasi Konsep**

#### **1. Efektivitas Program**

Efektivitas program aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) dalam pendataan kemiskinan ini sangat tergantung pada seberapa baik pendataan kemiskinan melalui aplikasi SIKS-NG yang dilakukan oleh sumber kesejahteraan sosial di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa dapat berhasil sesuai dengan tujuan program tersebut dilihat dari pemahaman program, tercapainya tujuan program, perubahan nyata, ketetapan sasaran program, sosialisasi program dan pemantauan program.

#### **2. Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG)**

Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) adalah sebuah program aplikasi yang dirancang untuk pendataan kemiskinan yang dilakukan oleh sumber kesejahteraan sosial di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa. Dalam sistem ini, Kementerian Sosial bertanggung jawab untuk menetapkan data yang diperbarui oleh Pemerintah Daerah, yang kemudian dijalankan oleh Lembaga Dinas Sosial.

Operasionalisasi konsep dapat dijelaskan sebagai panduan dalam melaksanakan aktivitas atau penelitian tertentu. Pada penelitian ini, fenomena yang menjadi kajian peneliti yaitu suatu studi efektivitas aplikasi Sistem Informasi

Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) dalam pendataan kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan. Dilihat dari fenomena yang ada berikut ini :

1. **Pemahaman Program**, fenomena ini digunakan untuk mengetahui sejauhmana para operator SIKS-NG mengetahui tentang program pengelolaan data kemiskinan melalui aplikasi SIKS-NG.
2. **Tercapainya Tujuan**, fenomena pencapaian tujuan dari program aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) dalam pendataan kemiskinan ini dapat dilihat dari tercapainya tujuan yang telah ditetapkan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap penerima bantuan sosial.
3. **Perubahan Nyata**, fenomena ini digunakan untuk melihat keberhasilan program bagi penerima manfaat adanya program aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) dalam pendataan kemiskinan.
4. **Ketetapan sasaran program**, fenomena ini digunakan untuk melihat keberhasilan Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan dalam melakukan program program aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) dalam pendataan kemiskinan sesuai dengan ketetapan waktu.
5. **Sosialisasi program**, fenomena ini digunakan untuk melihat kemampuan Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan dalam melakukan sosialisasi

program melalui saluran komunikasi berupa media komunikasi dan media informasi dan jangka waktu dalam mengsosialisasikan program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada Operator SIKS-NG yang ada di Kecamatan maupun di Desa dalam melaksanakan program yang dilakukan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG).

6. **Pemantauan program**, fenomena ini digunakan untuk melihat kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program yang dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) dengan mengantisipasi kendala yang dihadapi dan mengamati perkembangan program yang dilaksanakan.

#### **1.7.11.1 Faktor Pendukung dan Penghambat**

Faktor pendukung dan penghambat efektivitas program pendataan kemiskinan yang dilakukan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG), dapat dilihat dari gejala sebagai berikut :

Faktor Pendukung :

1. Dukungan Bimbingan Teknis dan atau Pelatihan untuk operator SIKS-NG

Dukungan bimbingan teknis dan pelatihan bagi operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) meliputi pemahaman tentang cara penggunaan perangkat lunak, pengelolaan data, pemecahan masalah teknis, dan penerapan prosedur standar operasi. Dengan adanya

pelatihan yang berkala dan berkelanjutan, para operator dapat mengoperasikan SIKS-NG dengan lebih efektif dan efisien, sehingga data yang dikelola lebih akurat dan dapat diandalkan.

## 2. Sarana Pendukung bagi Pelaksana Pengelola Data

Sarana pendukung bagi pelaksana pengelola data meliputi perangkat keras (komputer, *server*, jaringan internet yang stabil), perangkat lunak (program aplikasi, sistem manajemen basis data), serta fasilitas lain yang mendukung kelancaran kerja mereka.

## 3. Dukungan Masyarakat

Dukungan masyarakat adalah elemen penting dalam keberhasilan pengelolaan data kesejahteraan sosial. Dukungan ini dapat berupa partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan data yang akurat dan relevan, keterlibatan dalam program-program sosial, serta kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya data yang akurat untuk pengambilan kebijakan yang tepat.

### Faktor Penghambat :

#### 1. Data Masyarakat Yang Tidak Sinkron Dengan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Ketidaksinkronan data masyarakat dengan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menyebabkan ketidakcocokan dalam *database* pemerintah, menghambat berbagai layanan publik dan administrasi yang bergantung pada data akurat.

## 2. Penggunaan Data Penerima bantuan sosial banyak yang belum terupdate.

Data penerima bantuan sosial yang tidak terupdate mengakibatkan bantuan tidak tepat sasaran.

### **1.8 Metode Penelitian**

Pada hakikatnya masalah metode dalam suatu studi tidak terlepas dari apa yang menjadi pertanyaan dasar atau perumusan masalah dan tujuan penelitian. Hal ini akan memberikan sinyal kearah mana suatu penelitian akan digarap dan pendekatan apa yang akan diterapkan (Hadisuprpto, 2006, hal. 18). Pada bagian ini diuraikan mengenai metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, fokus penelitian, penelitiani penelitian, jenis dan sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, pemilihan informan, teknik analisa data, dan validasi data, fenomena penelitian.

#### **1.8.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Lexy J. Moleong, 2007).

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada

sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai efektivitas aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) dalam pendataan kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) dalam pendataan kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan.

### **1.8.2 Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) dalam pendataan kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan. Keberhasilan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) dalam pendataan kemiskinan masih di pertanyakan karena banyak ditemukan masalah-masalah seperti data tidak *valid*, tidak melakukan *update* data, bantuan tidak tepat sasaran, selain itu penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) dalam pendataan kemiskinan.

### **1.8.3 Situs Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu karena di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan sejak awal tahun 2019 sudah menerapkan aplikasi SIKS-G untuk mengelola data kemiskinan di setiap desa dan kelurahan, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang efektivitas aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) dalam pendataan kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan.

### **1.8.4 Fenomena Penelitian**

Fenomena penelitian adalah fakta yang ditemui di lapangan atas dasar permasalahan dan isu terkait Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) dalam pendataan kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan.

Tabel 1.3 Fenomena Penelitian

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala
Efektivitas program aplikasi SIKS-NG dalam pendataan kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan	Pemahaman Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan Petugas terkait pendataan melalui aplikasi SIKS-NG</li> <li>- Pendampingan yang dilakukan terkait petugas operator SIKS-NG</li> </ul>
	Tercapainya Tujuan Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tercapainya tujuan program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan</li> </ul>
	Perubahan Nyata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keberhasilan program bagi penerima manfaat</li> </ul>
	Ketetapan Sasaran Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>- keberhasilan Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menerapkan program aplikasi SIKS-NG sesuai dengan ketetapan waktu.</li> </ul>
	Sosialisasi Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah dan jenis saluran komunikasi yang digunakan untuk sosialisasi aplikasi SIKS-NG.</li> <li>- Tingkat keberhasilan dalam mencapai target sosialisasi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.</li> </ul>
	Pemantauan Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkembangan Program</li> <li>- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program SIKS-NG</li> </ul>
Faktor Pendukung dan Penghambat	<b>Faktor Pendukung Efektivitas program aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial <i>next generation</i> (SIKS-NG)</b>	
	Dukungan bimbingan teknis untuk operator SIKS-NG	Adanya pelatihan yang berkala dan berkelanjutan, para operator dapat mengoperasikan SIKS-NG dengan lebih efektif dan efisien, sehingga data yang dikelola lebih akurat dan dapat diandalkan.
	Sarana pendukung bagi pelaksana pengelola data	Sarana pendukung bagi pelaksana pengelola data meliputi perangkat keras (komputer, <i>server</i> , jaringan internet yang stabil), perangkat lunak (program aplikasi, sistem manajemen basis data), serta fasilitas lain.
	Dukungan Masyarakat	Dukungan ini dapat berupa partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan data yang akurat dan relevan, keterlibatan dalam program-program sosial, serta kesadaran dan pemahaman terhadap program.

Faktor Pendukung dan Penghambat	<b>Faktor Penghambat Efektivitas program aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial <i>next generation</i> (SIKS-NG)</b>	
	Data yang tidak sinkron dengan data Disdukcapil	Ketidakcocokan dalam <i>database</i> pemerintah, menghambat berbagai layanan publik dan administrasi yang bergantung pada data akurat.
	Penggunaan Data Penerima bantuan sosial banyak yang belum terupdate.	Data penerima bantuan sosial yang tidak <i>update</i> mengakibatkan bantuan tidak tepat sasaran

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024

### 1.8.5 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu “data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung” (Hadi, 2015, hal. 91). Sementara itu Muhadjir (1998, hal. 29) menambahkan bahwa data kualitatif yaitu, “data yang disajikan dalam bentuk kata-kata verbal bukan dalam bentuk angka”. Jadi, data kualitatif adalah data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung dan biasanya data dalam bentuk kata-kata verbal bukan dalam bentuk angka.

Adapun yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum dari objek penelitian, yang meliputi : gambaran umum Dinas Sosial Bengkulu Selatan, penjelasan mengenai efektivitas aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan

Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) dalam pendataan kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan.

Untuk memperoleh data kualitatif, peneliti membutuhkan dua sumber data. Sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian. Data Primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa informan yang terlibat dalam efektivitas aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) dalam pendataan kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen, regulasi, hasil-hasil studi, tesis, disertasi, jurnal, berita dan informasi dari internet yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder

dari penelitian ini buku pedoman SIKS-NG, Data angka kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan, dan penelitian terdahulu yang berkaitan.

#### **1.8.6 Instrumen Penelitian**

Didalam sebuah penelitian dibutuhkan instrumen untuk mendapatkan data yang valid (Moleong, 2010, hal. 168). Dalam penelitian ini, instrumen penelitiannya yaitu peneliti itu sendiri., serta observasi dan wawancara dengan para pemangku kepentingan yang terlibat dan dapat membagikan informasi yang digunakan pada penelitian. Kemudian peneliti juga menggunakan alat bantu dalam pengumpulan data berupa : Alat perekam wawancara, Alat pengambilan gambar (kamera, foto dan video), pedoman wawancara dan lain sebagainya digunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang tepat dan akurat, dilaksanakan wawancara mendalam kepada informan sebagai sumber informasi.

#### **1.8.7 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- 1) Observasi (pengamatan), pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan penelitian. Bungin (2007, hal. 115) mengemukakan

beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi partisipasi, observasi terstruktur atau terencana dan observasi tidak terstruktur, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis kejadian-kejadian yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung mengenai fenomena, perilaku manusia, proses kerja, dan hal-hal lain yang mampu menjawab permasalahan dari penelitian tentang efektivitas aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) dalam pendataan kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan.

- 2) Wawancara, yaitu proses tanya jawab yang dilakukan secara mendalam dengan berpedoman pada *interview guide* (pedoman wawancara) yang dibuat sebelum peneliti ke lapangan, menyiapkan beberapa pertanyaan untuk diajukan kepada informan selaku narasumber.
- 3) Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan lain sebagainya (Arikunto, 2013, hal. 158). Data yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini bisa dari dokumen-dokumen aktual yang berkaitan dengan objek penelitian. Wujud yang peneliti lihat dalam pengumpulan data penelitian ini seperti data visi dan misi di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu selatan, Petunjuk teknis SIKS-NG, dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia.

### 1.8.8 Pemilihan Informan

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang, karena memiliki informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan untuk menjawab dan memberikan informasi kepada peneliti. Informan memiliki nilai-nilai dan motifnya sendiri. Bukan tidak mungkin akan terdapat pertentangan nilai, ataupun pertentangan maksud dan tujuan antara informan dengan peneliti.

Pada penelitian ini, teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti adalah teknik *Purposive Sampling*. Pada penelitian ini, teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti adalah teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono dalam buku Memahami Penelitian Kualitatif (2012, hal. 54) “*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.

Daftar Informan yang menggunakan teknik *Purposive sampling* yaitu :

**Tabel 1.4 Informan penelitian**

No	Informan	Jumlah
1.	Informan A	Satu (1)
2.	Informan B	Satu (1)
3.	Informan C	Enam (6)
4.	Informan D	Tiga (3)

Sumber : Data diolah oleh Peneliti, 2024

### 1.8.9 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014, hal. 12–14). Komponen dalam analisis data Miles, Huberman dan Saldana (2014, hal. 12–13) sebagai berikut:

#### 1. Kondensasi data (*data condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris. Kesimpulannya bahwa proses kondensasi data ini diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara dan mendapatkan data tertulis yang ada di lapangan, yang nantinya transkrip wawancara tersebut dipilah-pilah untuk mendapatkan fokus penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti.

## 2. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data merupakan sebuah pengorganisasian, penyatuan, dan informasi yang disimpulkan. Penyajian data disini juga membantu dalam memahami konteks penelitian karena melakukan analisis yang lebih mendalam.

## 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions drawing*)

Penarikan kesimpulan disini dilakukan peneliti dari awal peneliti mengumpulkan data seperti mencari pemahaman yang tidak memiliki pola, mencatat keteraturan penjelasan, dan alur sebab akibat, yang tahap akhirnya disimpulkan keseluruhan data yang diperoleh peneliti.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang baru, dalam pengertian lain lain temuan tersebut masih bersifat samar-samar atau kurang jelas. Disini peneliti berusaha memperjelas dengan menggunakan teori yang sudah teruji keberhasilannya, lalu peneliti menganalisis temuan baru tersebut sehingga menjadi jelas dengan menggunakan komponen dari analisis data yaitu Kondensasi data (*data condensation*), Penyajian Data (*data display*), Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*).